



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN**  
**HAK ASASI MANUSIA SUMATERA UTARA**  
**DENGAN**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN**



Nomor : W.2-HH.04.02-23123  
Nomor : W2-A/1293/HM.01.1/VI/2023

**TENTANG**

**PERCEPATAN PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN/PENETAPAN YANG  
DIKELUARKAN OLEH PENGADILAN AGAMA SE-PROVINSI SUMATERA  
UTARA KEPADA BALAI HARTA PENINGGALAN MEDAN TERKAIT TUGAS  
DAN FUNGSINYA DALAM RANGKA PENINGKATAN PERLINDUNGAN  
HUKUM KEPADA MASYARAKAT**

---

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Hotel Emerald Garden, Jl. Kol. Yos Sudarso No.1 Kota Medan, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Imam Suyudi, Bc.I.P., S.H., M.H.  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara, berkedudukan di Jalan Putri Hijau No. 4 Medan,  
yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
  
2. Nama : Dr. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H., M.H.  
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Tinggi Agama Medan, berkedudukan di Jalan Kapten Sumarsono No.12 Medan,  
yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** :

- a. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkedudukan di Provinsi Sumatera Utara yang merupakan instansi vertikal yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

b. Menyelenggarakan fungsi pembinaan dan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, yaitu Balai Harta Peninggalan Medan yang wilayah kerjanya meliputi Provinsi Sumatera Utara.

2. Bahwa **PIHAK KEDUA :**

- a. Satuan Kerja yang diberikan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai peradilan tingkat banding dilandasi Visi dan Misi, yakni Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung.
- b. Salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang membawahi dan mengawasi Pengadilan Agama se-Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mempunyai kewenangan memerintahkan Ketua Pengadilan Agama se-Provinsi Sumatera Utara melalui Panitera untuk mempercepat penyampaian salinan putusan/penetapan Pengadilan Agama se-Provinsi Sumatera Utara kepada Balai Harta Peninggalan Medan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Lembaran Negara Tahun 1847 Nomor 23);
2. Ordonansi 5 Oktober 1872 tentang Instruksi untuk Balai-Balai Harta Peninggalan di Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1872 Nomor 166);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5078);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan;

Bahwa **PARA PIHAK :**

1. Menginformasikan dan melaksanakan Nota Kesepahaman Bersama ini kepada seluruh jajaran dan/atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) masing - masing instansi;
2. Sepakat menandatangani Nota Kesepahaman Bersama untuk mengadakan kerjasama dalam rangka percepatan penyampaian salinan putusan/penetapan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan Medan.

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam penyampaian salinan putusan/penetapan Pengadilan Agama se-Provinsi Sumatera Utara yang terkait dengan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan Medan secara optimal, profesional, dan proporsional.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama antar **PARA PIHAK** dalam memberikan perlindungan dan pelayanan hukum kepada masyarakat secara efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini adalah putusan/penetapan yang terkait dengan PERWALIAN dan PENGAMPUAN yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama setempat perlu segera disampaikan kepada Balai Harta Peninggalan Medan.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Apabila Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tinggi Agama setempat serta Mahkamah Agung mengeluarkan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka Panitera Pengadilan Agama setempat harus segera menyampaikan putusan/penetapan tersebut kepada Balai Harta Peninggalan Medan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mengirimkan pemberitahuan tentang adanya putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Balai Harta Peninggalan Medan melalui :
  - a. Surat Elektronik dengan alamat : [bhp.medan2011@gmail.com](mailto:bhp.medan2011@gmail.com), dan/atau;
  - b. Surat Tercatat dengan alamat : Jalan Listrik No. 10, Medan.
- (3) Apabila terdapat permohonan pengalihan atas harta anak dibawah umur dan orang yang diampu, maka Pengadilan terlebih dahulu meminta pendapat dari Balai Harta Peninggalan Medan selaku wali pengawas dan pengampu pengawas sebelum permohonan tersebut dikabulkan.

**Pasal 4**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

Dalam rangka menjamin terselenggaranya Nota Kesepahaman Bersama ini **PARA PIHAK** sepakat melakukan *Monitoring* dan Evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini melalui pertemuan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun sesuai dengan kesepakatan.

**Pasal 5**  
**PENYEBARAN NOTA KESEPAHAMAN**

**PARA PIHAK** wajib menyebarkan Nota Kesepahaman Bersama ini kepada seluruh unit pelaksana teknis atau jajaran masing-masing agar Nota Kesepahaman Bersama tersebut dapat dilaksanakan/dijalankan sebagaimana mestinya.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

**Pasal 7**  
**FORCE MAJEUR**

Dalam hal terjadi keadaan *Force Majeure* yang tidak dapat diatasi, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 8**  
**PEMBIAYAAN**

Pembayaran yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional.

**Pasal 9**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaiakannya secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 10**  
**KETENTUAN LAIN**

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Nota Kesepahaman Bersama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 11**  
**PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini, ditandatangani pada hari ini, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dipegang oleh **PARA PIHAK**.

<p><b>PIHAK PERTAMA,</b> KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA UTARA</p> <p>Drs. Imam Suyudi, Bc.I.P., S.H., M.H. NIP. 19631207 198703 1 001</p>	<p><b>PIHAK KEDUA,</b> KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN</p> <p>DR. H. ABD. HAMID PULUNGAN, S.H., M.H. NIP. 19580705 198603 1 001</p>
---	---



A large black ink signature is written across the middle of the document, spanning from the signature of the first party on the left to the signature of the second party on the right, crossing over the central stamp.